

Paradoks Fiskal dalam Struktur APBD: Dominasi Belanja Pegawai dan Rendahnya Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Rr Lilis Intan Permatasari¹, Widia Octari Diliiana², Novising Dewi Astuti³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana

Email: ¹rr.permatasari@staf.undana.ac.id, ²widia.diliiana@staf.undana.ac.id, ³novising.astuti@staf.undana.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹rr.permatasari@staf.undana.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Paradoks fiskal Belanja modal Belanja pegawai Path dependency Value for money APBD Nusa Tenggara Timur	Desentralisasi fiskal menempatkan APBD sebagai instrumen utama layanan publik, namun realitas di daerah tertinggal menunjukkan paradoks: anggaran meningkat tanpa diiringi kualitas belanja yang lebih baik. Penelitian ini menganalisis paradoks fiskal pada struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2025, berupa dominasi belanja pegawai di tengah kontraksi tajam belanja modal. Menggunakan paradigma interpretivisme, pendekatan studi kasus multipel, dan teknik <i>cross-case synthesis</i>, penelitian ini mengolah data aktual Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2025 dari 22 kabupaten/kota dan Provinsi NTT, dikombinasikan dengan Kajian Fiskal Regional (KFR) NTT 2025 dan data dari Badan Pusat Statistik. Hasil menunjukkan proporsi belanja modal anjlok dari 18,27 persen (2023) menjadi 6,40 persen (2025), sementara proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi naik dari 60,03 menjadi 68,19 persen. Analisis <i>value for money</i> mengonfirmasi misalokasi struktural, kegagalan eksekusi anggaran modal (37,55 persen pagu terealisasi), dan <i>disconnection</i> dengan capaian pembangunan manusia (IPM tertinggal 5,91 poin dari rata-rata nasional). Kerangka <i>path dependency</i> dan <i>incrementalism</i> menjelaskan persistensi paradoks ini sebagai hasil komitmen belanja pegawai masa lalu yang sulit dibatalkan dan pola penganggaran inkremental berbasis <i>baseline</i>.
	Abstract
Keywords: Fiscal paradox Capital expenditure Personnel expenditure Path dependency Value for money Regional budget East Nusa Tenggara	Fiscal decentralization positions the Regional Budget (APBD) as the primary instrument for public services, but the reality in underdeveloped regions presents a paradox: budget increases without a corresponding improvement in spending quality. This study analyzes the fiscal paradox in the structure of the 2025 Regional Budget (APBD) of East Nusa Tenggara (NTT), characterized by the dominance of personnel expenditures amidst a sharp contraction in capital expenditures. Using an interpretivism paradigm, a multiple case study approach, and cross-case synthesis techniques, this study analyzes actual data from the Budget Realization Report (LRA) as of December 31, 2025, from 22 districts/cities and NTT Province, combined with the 2025 NTT Regional Fiscal Review (KFR) and data from the Central Statistics Agency (BPS). The results show that the proportion of capital expenditure plummeted from 18.27 percent (2023) to 6.40 percent (2025), while the proportion of personnel expenditure to operating expenditure rose from 60.03 to 68.19 percent. A value-for-money analysis confirms structural misallocation, failed capital budget execution (37.55 percent of the budget realized), and disconnection from human development outcomes (the HDI lags 5.91 points behind the national average). The path dependency and incrementalism frameworks explain the persistence of this paradox as a result of past, difficult-to-revoke personnel spending commitments and a baseline-based, incremental budgeting pattern.

JuKSIT is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License



1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang dijalankan Indonesia sejak tahun 2001 menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak penyediaan layanan publik, dengan konsekuensi bahwa kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi penentu utama kesejahteraan masyarakat [1]. Namun, dua dekade implementasi mengungkap paradoks yang persisten di banyak daerah tertinggal: besarnya alokasi anggaran tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kapasitas layanan publik, karena struktur APBD secara konsisten didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja modal yang bersifat investasi produktif semakin termarginalisasi [2], [3]. Kondisi ini mengindikasikan adanya disonansi antara tujuan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah dan realitas alokasi anggaran yang masih belum efisien [4].

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi representasi paling tajam dari paradoks ini. Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, mencapai 17,50 persen pada September 2025 [5], NTT secara teoritis paling membutuhkan investasi publik masif dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2025 dan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi NTT Tahun 2025 justru menunjukkan arah sebaliknya: proporsi belanja modal terhadap total belanja konsolidasian anjlok dari 18,27 persen (2023) menjadi 6,40 persen (2025), sementara proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi melonjak dari 60,03 persen (2023) menjadi 68,19 persen (2025). Pola ini merefleksikan alokasi yang condong pada pengeluaran rutin dibandingkan investasi infrastruktur strategis yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan dasar [6].

Pada dimensi kemandirian fiskal, kondisi NTT tidak kalah mengkhawatirkan. Data Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dalam KFR Provinsi NTT Tahun 2025 menunjukkan rata-rata IKF 22 kabupaten/kota hanya 8,20 persen, dengan delapan daerah berada di bawah 5 persen. Kondisi ini menciptakan siklus dependensi yang semakin dalam: ketergantungan transfer cenderung mendorong dominasi belanja pegawai, rendahnya belanja modal berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan pada akhirnya membatasi kemampuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri [1], [7], [8], [9], [10]. Dalam literatur ekonomi publik kontemporer, kondisi ini diidentifikasi sebagai paradoks fiskal: peningkatan pendapatan dan transfer dari pusat tidak diiringi peningkatan kualitas belanja, melainkan terjebak dalam pusaran pengeluaran rutin konsumtif, sehingga anggaran tampak besar namun capaian pembangunan tetap tidak optimal [11], [12], [13], [14].

Kajian tentang struktur belanja daerah di Indonesia telah cukup berkembang, namun dua celah literatur signifikan masih belum terjawab. Pertama, sebagian besar penelitian mengandalkan data agregat nasional atau panel provinsi yang tidak mampu menangkap variasi antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi [15], [16], [17]. Kedua, penelitian mengenai struktur belanja pemerintah daerah umumnya masih dilakukan pada daerah-daerah di Indonesia bagian barat dengan karakteristik fiskal yang berbeda dari kawasan tertinggal Indonesia Timur [18], [19].

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis data realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT yang dipadukan dengan data KFR Provinsi NTT Tahun 2025. Data tersebut memberikan bukti empiris mengenai paradoks fiskal pada periode implementasi kebijakan efisiensi belanja nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) — yang mengubah skema transfer ke daerah, termasuk komponen *earmark* belanja daerah [20]. Reformasi tersebut dinilai lebih memperkuat pengendalian pemerintah pusat terhadap penggunaan dana transfer dibandingkan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah [1]. Dalam konteks inilah penelitian tentang paradoks komposisi belanja NTT menjadi relevan secara kebijakan: apakah mekanisme transfer dan insentif yang berlaku saat ini mendorong atau justru menghambat reorientasi belanja menuju investasi yang lebih produktif bagi masyarakat NTT?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivisme dengan pendekatan studi kasus multipel [21], dipilih karena kemampuannya menangkap variasi dan nuansa antar-unit analisis dalam konteks yang sama. Komparasi antar-daerah dilakukan melalui teknik *cross-case synthesis* [22] untuk mengidentifikasi pola umum paradoks fiskal di NTT sekaligus variasi yang menjelaskan perbedaannya. Objek penelitian adalah struktur belanja APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dihimpun dari: (1) Dokumen Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi NTT Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT; (2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Per 31 Desember 2025 yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi NTT; (3) Data dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan BPS Provinsi NTT yang mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, prevalensi *stunting*, dan indikator kesejahteraan lainnya.

Analisis data dilaksanakan melalui enam tahap yang dirancang untuk mengintegrasikan kekuatan data kuantitatif aktual dengan kedalaman interpretasi kualitatif, sejalan dengan pendekatan *qualitative data analysis* [22] yang menekankan kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan secara iteratif. Tahap pertama, ekstraksi dan kompilasi data belanja daerah serta Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Tahap kedua, perhitungan rasio paradoks fiskal per daerah. Tahap ketiga, analisis deskriptif komparatif komposisi belanja antar-daerah. Tahap keempat, *cross-case synthesis* untuk mengidentifikasi pola lintas-daerah dan variasi yang bermakna. Tahap kelima, evaluasi *value for money* pada tiga dimensi, yaitu *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*. Tahap keenam, interpretasi teoritis menggunakan kerangka *path dependency* dan *incrementalism* dalam penganggaran publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Makro: Struktur Belanja APBD Konsolidasian NTT Tahun 2023–2025

Analisis komparatif struktur belanja APBD konsolidasian NTT tahun 2023–2025 mengungkap pola yang sangat konsisten: dominasi belanja pegawai yang persisten di tengah kontraksi belanja modal yang semakin dalam. Tabel 1 menyajikan analisis komprehensif tren ini.

Tabel 1. Struktur Belanja APBD Konsolidasian Provinsi NTT Tahun 2023–2025 (Rp Miliar)

Komponen Belanja	2023		2024		2025		Growth 2025
	Pagu	Real.	Pagu	Real.	Pagu	Real.	
Belanja Operasi	18.838	15.147	20.949	17.424	22.383	14.907	▼ 14,45%
— Belanja Pegawai	10.706	9.086	11.760	10.304	14.152	10.165	▼ 1,35%
— Belanja Barang & Jasa	7.272	5.411	7.583	5.616	7.160	4.318	▼ 23,11%
— Belanja Bunga	128	52	104	38	84	54	▲ 42,24%
— Belanja Hibah	559	438	1.390	1.376	927	301	▼ 78,11%
— Belanja Bansos	173	160	112	90	60	69	▼ 23,38%
Belanja Modal	4.615	4.360	3.938	3.175	3.320	1.247	▼ 60,73%
Belanja Transfer	4.481	4.325	4.770	3.874	4.771	3.304	▼ 14,73%
Belanja Tidak Terduga	221	32	201	22	136	37	▲ 65,99%
TOTAL BELANJA DAERAH	28.154	23.864	29.858	24.496	30.609	19.495	▼ 20,42%
Rasio Pegawai/Operasi	—	60,03%	—	59,14%	—	68,19%	▲ +8,16 pp
Rasio Modal/Total Belanja	—	18,27%	—	12,96%	—	6,40%	▼ -11,87 pp
Rasio Operasi/Total Belanja	—	63,48%	—	71,13%	—	76,47%	▲ +5,34 pp
SiLPA (Rp Miliar)	—	2.328	—	1.966	—	3.548	▲ 80,52%

Sumber: KFR Provinsi NTT Tahun 2025, diolah peneliti. Keterangan: pp = poin persentase.

Temuan paling signifikan dari Tabel 1 adalah asimetri mencolok antara ketahanan belanja pegawai dan kerentanan belanja modal terhadap tekanan fiskal eksternal. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional 2025, belanja pegawai hanya berkontraksi 1,35 persen — dari Rp10.304 miliar (2024) menjadi Rp10.165 miliar (2025) — sementara pagunya justru naik 20,34 persen, dari Rp11.760 miliar menjadi Rp14.152 miliar. Kesenjangan Rp3.987 miliar antara pagu dan realisasi bukan mencerminkan efisiensi, melainkan menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai, khususnya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), belum sepenuhnya dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran, sehingga mencerminkan rendahnya kapasitas eksekusi anggaran [23]. Dalam kerangka teori *path dependency* [24], kondisi ini merupakan manifestasi nyata mekanisme *increasing returns*: kewajiban rekrutmen pegawai yang tercipta di masa lalu hampir tidak dapat dibatalkan bahkan dalam tekanan fiskal yang sangat besar. Kondisi ini sekaligus mencerminkan *mandatory-discretionary asymmetry*, yaitu kondisi ketika komponen *mandatory* seperti belanja pegawai secara struktural mendominasi dan menggeser komponen *discretionary* seperti belanja modal [25].

Sebaliknya, belanja modal mengalami penurunan yang dramatis, berkontraksi 60,73 persen dari Rp3.175 miliar (2024) menjadi Rp1.247 miliar (2025) — nilai terendah dalam tiga tahun dan hanya 37,55 persen dari pagu Rp3.320 miliar. Kontraksi ini bersumber dari tiga faktor simultan: pemotongan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh pemerintah pusat, hambatan kapasitas eksekusi internal berupa gagal kontrak di Kabupaten Kupang dan wanprestasi kontraktor di Alor dan Sikka, serta ketidaksesuaian antara perencanaan pengadaan dan kondisi lapangan [23]. Yang paling mengkhawatirkan adalah komponen belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi — komponen terbesar dan paling krusial

bagi konektivitas 653 pulau di NTT [26], [27] — hanya terealisasi Rp457 miliar atau 26,09 persen dari pagu. Bagi provinsi kepulauan seperti NTT, kontraksi yang sangat dalam (60,73%) pada belanja modal menunjukkan menurunnya investasi publik daerah [23] dan berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur konektivitas serta peningkatan akses layanan publik.

Konvergensi dua tren berlawanan ini menghasilkan pergeseran komposisi yang semakin ekstrem: proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi meningkat 8,16 poin persentase dalam dua tahun, dari 60,03 persen (2023) menjadi 68,19 persen (2025), sedangkan proporsi belanja modal terhadap total belanja anjlok 11,87 poin persentase pada periode yang sama, dari 18,27 persen menjadi hanya 6,40 persen. Berdasarkan komposisi APBD di luar belanja transfer, belanja modal hanya mencapai 7,70 persen, jauh di bawah batas minimal 40 persen, sementara belanja pegawai mencapai 62,78 persen, melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam UU HKPD 2022. Memperparah kondisi ini, SiLPA NTT 2025 justru melonjak 80,52 persen menjadi Rp3.548 miliar, tertinggi dalam tiga tahun [23]. Fakta bahwa SiLPA membengkak bersamaan dengan kontraksi belanja modal menunjukkan bahwa paradoks fiskal NTT bukan semata akibat keterbatasan sumber daya, melainkan mengindikasikan lemahnya kapasitas eksekusi anggaran sehingga sumber daya fiskal yang tersedia belum mampu dikonversi menjadi belanja yang produktif.

3.2 Analisis Belanja Per Fungsi: Kontraksi yang Tidak Merata dan Redistribusi Prioritas

Memahami paradoks fiskal NTT secara lebih mendalam memerlukan disagregasi belanja berdasarkan fungsi pemerintahan untuk mengidentifikasi sektor yang paling terdampak oleh kontraksi fiskal. Tabel 2 menyajikan gambaran yang kompleks dan bernuansa tentang dinamika ini.

Tabel 2. Belanja APBD Regional NTT Menurut Fungsi Tahun 2023–2025 (Rp Miliar)

Fungsi Belanja	2023	2024	2025	Growth 2025	Catatan Analitis
Pelayanan Umum	8.601	17.768	10.775	▼ 39,36%	Termasuk belanja adm. pemerintahan dan keuangan
Pendidikan	8.134	11.507	3.135	▼ 72,76%	Kontraksi terbesar; kendala DAU <i>Specific Grant</i> PPPK
Kesehatan	4.891	2.196	2.478	▲ 12,82%	Satu-satunya fungsi layanan dasar yang tumbuh positif
Ekonomi	5.593	2.136	1.041	▼ 51,24%	Kapasitas investasi produktif menyusut drastis
Perumahan & Fasilitas Umum	668	322	1.470	▲ 356,87%	Fokus pemenuhan SPM sanitasi & air bersih
Perlindungan Sosial	206	84	171	▲ 105,17%	Peran APBD sebagai jaring pengaman sosial
Lingkungan Hidup	380	201	135	▼ 32,70%	Kontraksi seiring pengurangan program lingkungan
Pariwisata	101	49	57	▲ 16,09%	Pertumbuhan didominasi oleh pariwisata Labuan Bajo
Ketertiban & Keamanan	221	69	233	▲ 235,37%	Lonjakan signifikan, didominasi fungsi ketertiban
TOTAL	28.796	34.332	19.495	▼ 43,22%	Kontraksi terbesar dalam 3 tahun terakhir

Sumber: KFR Provinsi NTT Tahun 2025, diolah dan diperkaya dengan catatan analitis oleh peneliti.

Disagregasi belanja per fungsi mengungkap kontraksi yang sangat tidak merata dan mencerminkan tekanan pada sektor-sektor paling krusial. Fungsi pendidikan mengalami kontraksi paling dramatis, sebesar 72,76 persen, dari Rp11.507 miliar (2024) menjadi Rp3.135 miliar (2025) — bahkan lebih rendah dari 2023 (Rp8.134 miliar). KFR Provinsi NTT Tahun 2025 mengidentifikasi hambatan utama berupa kegagalan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* untuk penggajian PPPK, diperparah oleh 590 kasus retur tunjangan guru akibat ketidaksesuaian data rekening, sehingga menciptakan 'paradoks dalam paradoks': pagu besar namun tidak dapat terealisasi karena hambatan administratif.

Satu-satunya pertumbuhan positif pada fungsi layanan dasar adalah kesehatan (12,82%), meski dari basis yang sudah sangat terkompresi pada 2024, mencerminkan komitmen terhadap agenda nasional penurunan *stunting*. Sebaliknya, belanja fungsi ekonomi yang mencakup pembiayaan proyek infrastruktur produktif, pengembangan pertanian, dan dukungan industri lokal — berkontraksi 51,24 persen, menyusutkan kapasitas investasi produktif yang kritis bagi NTT, mengingat 28,58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini bergantung pada sektor pertanian [23]. Anomali spektakuler terjadi pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang tumbuh 356,87 persen, KFR Provinsi NTT

Tahun 2025 menginterpretasikan ini sebagai respons pemerintah daerah yang memfokuskan sumber daya tersisa untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sanitasi dan air bersih, sebuah sinyal adaptasi kebijakan di tengah tekanan fiskal.

3.3 Variasi Paradoks Fiskal Antar-22 Kabupaten/Kota

Penelitian ini menggunakan data aktual Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2025 untuk seluruh 22 kabupaten/kota dan Provinsi NTT. Tabel 3 menyajikan gambaran komprehensif yang memungkinkan komparasi berbasis data primer antar-daerah.

Tabel 3. Profil Belanja APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2025 (Rp Miliar)

No.	Kab/Kota	IKF (%)	Bel. Pegawai	Bel. Operasi	Bel. Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai/Operasi (%)	Belanja Modal/Total Belanja (%)
1	Kab. Sumba Tengah	3.73%	256.37	430.06	48.58	563.44	59.61%	8.62%
2	Kab. Ngada	3.80%	363.83	502.76	77.03	751.80	72.37%	10.25%
3	Kab. Sabu Raijua	4.10%	242.43	406.18	81.74	579.96	59.69%	14.09%
4	Kab. Lembata	4.39%	391.93	553.52	46.96	755.88	70.81%	6.21%
5	Kab. Sumba Barat Daya	4.53%	369.63	701.37	112.26	1043.46	52.70%	10.76%
6	Kab. Alor	4.91%	515.27	785.03	90.78	944.91	65.64%	9.61%
7	Kab. Timur Tengah Selatan (TTS)	4.92%	708.98	896.07	72.05	1218.99	79.12%	5.91%
8	Kab. Timor Tengah Utara (TTU)	4.99%	514.72	731.74	39.65	941.40	70.34%	4.21%
9	Kab. Rote Ndao	5.87%	380.67	559.62	53.60	753.68	68.02%	7.11%
10	Kab. Flores Timur	5.94%	483.52	716.32	75.73	1025.23	67.50%	7.39%
11	Kab. Manggarai Timur	6.52%	483.49	668.70	189.23	1054.46	72.30%	17.95%
12	Kab. Sumba Timur	7.01%	458.49	671.77	51.94	857.63	68.25%	6.06%
13	Kab. Kupang	7.28%	536.35	778.04	93.29	1064.89	68.94%	8.76%
14	Kab. Malaka	7.54%	321.81	548.02	73.40	770.56	58.72%	9.53%
15	Kab. Ende	7.72%	433.70	609.74	80.77	892.80	71.13%	9.05%
16	Kab. Nagekeo	7.82%	331.39	487.41	28.97	619.27	67.99%	4.68%
17	Kab. Manggarai	8.65%	545.18	865.57	88.34	1137.27	62.99%	7.77%
18	Kab. Sikka	10.38%	586.72	863.27	58.58	1117.41	67.96%	5.24%
19	Kab. Belu	12.00%	395.84	641.22	68.51	819.48	61.73%	8.36%
20	Kab. Sumba Barat	13.13%	288.56	488.16	83.93	659.03	59.11%	12.74%
21	Kab. Manggarai Barat	21.60%	518.84	895.05	84.66	1175.29	57.97%	7.20%
22	Kota Kupang	23.56%	589.71	915.57	195.14	1115.71	64.41%	17.49%
23	RATA-RATA 22 KAB/KOTA	8.20%	441.70	669.33	81.60	902.84	66.04%	9.04%
24	Provinsi NTT	33.97%	1931.27	3367.07	310.11	4247.38	57.33%	7.30%

Sumber: LRA Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Per 31 Desember 2025, KFR Provinsi NTT Tahun 2025, diolah peneliti.

Tabel 3 mengungkap distribusi IKF yang sangat timpang: rata-rata hanya 8,20 persen dengan rentang hampir 20 poin persentase antara Kab. Sumba Tengah (3,73%) dan Kota Kupang (23,56%). Hanya dua daerah yang melampaui IKF 20 persen, sementara delapan daerah berada di bawah 5 persen. Ketimpangan ini tidak acak: daerah dengan IKF tertinggi adalah pusat ekonomi dengan diversifikasi sumber PAD yang lebih baik — Kota Kupang mengandalkan basis pajak jasa dan perdagangan, sementara Manggarai Barat diuntungkan oleh pariwisata premium Labuan Bajo [23]. Sebaliknya, daerah dengan IKF terendah — Sumba Tengah, Ngada, dan Sabu Raijua — masih memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan [28], sehingga kapasitas penggalan PAD relatif terbatas.

Proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi bervariasi dari 52,70 persen (Sumba Barat Daya) hingga 79,12 persen (TTS), dengan rata-rata 66,04 persen. Temuan kritis yang menarik adalah daerah dengan IKF terendah tidak selalu memiliki proporsi pegawai tertinggi: Kab. Sumba Tengah dengan IKF terendah (3,73%) justru mencatatkan proporsi pegawai 59,61 persen (lebih rendah dari rata-rata), sebaliknya Kab. Manggarai Timur (IKF 6,52%) dan Kab. Ende (IKF 7,72%) mencatatkan proporsi belanja pegawai tertinggi ketiga (72,30%) dan keempat (71,13%) di seluruh NTT. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keputusan masa lalu dapat menciptakan mekanisme *path dependency* melalui proses *self-*

reinforcing dan *increasing returns*, sehingga pilihan kebijakan menjadi semakin sulit diubah [24]. Anomali penting lain terlihat pada Kab. Sumba Barat Daya, dengan IKF yang hanya 4,53 persen, namun berhasil mempertahankan proporsi pegawai (52,70%) jauh di bawah rata-rata — sekaligus mengalokasikan belanja modal terbesar (Rp112,26 miliar) di antara daerah dengan IKF di bawah 5 persen. Hal ini merupakan bukti empiris bahwa terdapat ruang bagi kebijakan lokal untuk mengelola komposisi belanja secara lebih baik meskipun dalam keterbatasan fiskal yang sama.

Proporsi belanja modal terhadap total belanja menunjukkan variasi yang cukup lebar, yaitu antara 4,21 persen (Kab. TTU) hingga 17,95 persen (Kab. Manggarai Timur), dengan rata-rata 9,04 persen. Sebanyak 12 daerah mencatatkan proporsi modal di bawah 10 persen, kondisi yang menunjukkan bahwa ruang investasi publik menjadi sangat terbatas dalam satu tahun anggaran. Di antara daerah dengan IKF di bawah 5 persen, Kab. TTU, TTS, dan Lembata hanya mengalokasikan belanja modal sebesar 4,21–6,21 persen dari total belanja. Sebaliknya, Kab. Sabu Raijua meskipun memiliki IKF hanya 4,10 persen, mampu mengalokasikan 14,09 persen sehingga menjadikannya daerah dengan proporsi belanja modal tertinggi ketiga di NTT. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal terbatas pun masih dapat memprioritaskan belanja modal.

Temuan anomali terlihat pada Kab. Nagekeo (IKF 7,82%), yang mencatatkan proporsi modal terendah kedua se-NTT (4,68%) dengan belanja modal hanya Rp28,97 miliar (terkecil se-NTT). Hal serupa terjadi pada Kab. Sumba Timur (IKF 7,01%) yang mencatatkan proporsi modal 6,06 persen (terendah kelima) dengan belanja modal Rp51,94 miliar. Sementara Kab. Sikka yang meski memiliki IKF (10,38%) jauh di atas rata-rata, namun hanya mengalokasikan belanja modal sebesar Rp58,58 miliar yang mencatatkan proporsi modal (5,24%) terendah ketiga di NTT. Temuan ini menunjukkan bahwa paradoks fiskal tidak eksklusif milik daerah ber-*IKF* sangat rendah, tetapi juga dapat terjadi pada daerah dengan kapasitas fiskal relatif lebih baik ketika ruang fiskalnya dibatasi oleh tingginya komitmen belanja pegawai yang bersifat persisten (*fiscal rigidity*).

3.4 Evaluasi Value for Money (VfM)

Kerangka *value for money* [29] menyediakan instrumen evaluasi komprehensif untuk menilai kualitas belanja publik pada tiga dimensi yang saling berkaitan. Penerapan kerangka ini pada paradoks fiskal NTT menghasilkan penilaian yang sistematis dan dapat dikomparasi lintas-daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Analisis Value for Money Paradoks Fiskal APBD NTT 2025

Dimensi VfM	Pertanyaan Evaluasi	Temuan Empiris	Penilaian dan Implikasi
Economy	Apakah sumber daya dialokasikan secara optimal sesuai prioritas pembangunan?	Belanja pegawai 68,19% dari belanja operasi (Rp10.165 M dari Rp14.907 M); pagu pegawai naik 20,34% (yoy) di tengah kebijakan efisiensi; 12 daerah memiliki proporsi pegawai di atas rata-rata (66,04%) dari 22 daerah.	TIDAK MEMADAI. Terjadi misalokasi struktural: sebagian besar sumber daya mengalir ke belanja yang tidak menghasilkan aset publik, mencerminkan <i>fiscal rigidity</i> yang menghalangi reformasi anggaran.
Efficiency	Apakah sumber daya menghasilkan <i>output</i> fiskal yang memadai per satuan belanja?	Belanja modal hanya Rp1.247 M (6,40% dari total; turun dari 18,27% pada 2023); realisasi pagu modal 37,55%; belanja jalan/jaringan/irigasi hanya terealisasi 26,09% dari pagu (Rp457 M dari Rp1.750 M).	SANGAT TIDAK MEMADAI. Gap kapasitas eksekusi sangat besar (62,45% pagu modal tidak terserap); SiLPA melonjak menjadi Rp3,55 triliun, menandakan kegagalan eksekusi, bukan efisiensi.
Effectiveness	Apakah pola belanja menghasilkan <i>outcome</i> pembangunan manusia yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah?	IPM NTT 69,89 (nasional 75,90; defisit 5,91 poin); kemiskinan 17,50% (tertinggi keenam nasional); stunting 37% (tertinggi nasional); belanja pendidikan terkontraksi 72,76%.	TIDAK EFEKTIF. Terjadi <i>disconnection fundamental</i> antara pola belanja dan <i>outcome</i> ; belanja operasi-dominan tidak menghasilkan aset publik yang berdampak jangka panjang.

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data LRA Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Per 31 Desember 2025, KFR Provinsi NTT Tahun 2025, dan BPS 2025.

Evaluasi dimensi *economy* menilai apakah sumber daya publik dialokasikan secara optimal sesuai prioritas pembangunan. Temuan penelitian mengungkap kondisi yang jauh dari memadai: rata-rata 66,04 persen dari total belanja operasi 22 kabupaten/kota mengalir ke belanja pegawai, meningkat dari 60,03 persen pada 2023. Kondisi ini semakin problematik ketika pagu belanja pegawai naik 20,34 persen menjadi Rp14.152 miliar di tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang nyata, sementara KFR Provinsi NTT Tahun 2025 secara eksplisit mencatat bahwa rekrutmen masif PPPK

menyebabkan pagu minus pada beberapa satuan kerja. Ini berarti pemerintah daerah menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang tanpa kepastian kapasitas fiskal yang memadai untuk memenuhinya. Dari perspektif *value for money*, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya dimensi *economy* dalam pengambilan keputusan anggaran [29]. Di sisi lain, praktik penganggaran yang masih berorientasi pada input — tercermin dari penambahan jumlah pegawai tanpa keterkaitan yang jelas dengan hasil layanan — mengindikasikan bahwa transformasi menuju penganggaran berorientasi *outcome* dan *public value* [30] belum sepenuhnya terwujud.

Evaluasi dimensi *efficiency* menilai apakah sumber daya menghasilkan *output* yang memadai per satuan belanja. Realisasi belanja modal tahun 2025 yang hanya 37,55 persen dari pagu tidak terkonversi menjadi aset publik dan mengendap sebagai SiLPA. Kegagalan ini bersifat multifaktorial: gagal kontrak akibat mundurnya Pejabat Pembuat Komitmen (Kab. Kupang), wanprestasi kontraktor (Kab. Alor, Sikka), ketidaksesuaian perencanaan dengan kondisi lapangan, dan penumpukan realisasi di akhir tahun yang memaksa penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Yang paling kritis secara sosial-ekonomi adalah komponen belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya terealisasi 26,09 persen dari pagu. Bagi provinsi kepulauan seperti NTT, konektivitas infrastruktur merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, sehingga kegagalan merealisasikan 74 persen anggaran jalan dan irigasi mencerminkan kegagalan efisiensi dengan konsekuensi nyata bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil [27], [31].

Evaluasi dimensi *effectiveness* menilai apakah pola belanja menghasilkan *outcome* pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dimensi ini mengungkap *disconnection* yang paling fundamental antara pola belanja dan capaian pembangunan manusia. Meskipun APBD NTT telah mengalokasikan triliunan rupiah selama bertahun-tahun, capaian pembangunan manusia masih jauh tertinggal: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tercatat 69,89, atau 5,91 poin di bawah rata-rata nasional [32]; tingkat kemiskinan 17,50 persen, tertinggi keenam secara nasional [5]; dan prevalensi *stunting* mencapai 37 persen, tertinggi secara nasional [33]. Ketiga indikator ini menunjukkan bahwa pola belanja yang didominasi komponen operasional belum menghasilkan *outcome* pembangunan manusia yang sepadan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.

3.5 Path Dependency dan Incrementalism: Mengapa Paradoks Ini Bertahan

Pertanyaan teoritis utama dalam penelitian ini bukan hanya bagaimana paradoks fiskal di NTT terbentuk, melainkan mengapa pola tersebut tetap bertahan dalam setiap siklus penganggaran. Dua kerangka teoritis, *path dependency* [24] dan *incrementalism* [34], [35] — menyediakan penjelasan yang saling melengkapi.

Mekanisme *path dependency* bekerja melalui logika *increasing returns to commitment*: komitmen belanja pegawai yang terbentuk dari keputusan anggaran pada periode-periode sebelumnya hampir tidak dapat ditarik kembali, karena biaya untuk keluar dari jalur ini dianggap terlalu besar. Indikasi ini tercermin dari pagu belanja pegawai yang naik 20,34 persen menjadi Rp14.152 miliar meskipun di tengah kebijakan efisiensi nasional — pemerintah daerah telah menganggarkan kenaikan belanja pegawai yang sangat besar untuk memenuhi komitmen yang telah terbentuk pada periode sebelumnya dan tidak dapat dibatalkan begitu saja. Bahkan ketika realisasi tidak mencapai pagu, kewajiban tetap ada dan akan terus menuntut pemenuhan pada tahun-tahun berikutnya. Inilah esensi dari *fiscal lock-in* yang dihasilkan oleh mekanisme *path dependency*.

Mekanisme *incrementalism* bekerja secara komplementer: ketika anggaran tahun berikutnya disusun, titik berangkat selalu angka tahun sebelumnya, dan penyesuaian dilakukan secara marginal [35]. Akibatnya, belanja pegawai yang sudah besar pada tahun berjalan cenderung menjadi *baseline* yang besar pada tahun berikutnya, sementara proporsi belanja modal yang kecil menjadi *baseline* yang kecil pula. Tanpa intervensi kebijakan yang secara eksplisit dan kuat mengubah struktur alokasi belanja, pola yang teramati pada periode 2023–2025 berpotensi terus direproduksi, mengunci NTT dalam siklus paradoks fiskal yang diperkuat oleh struktur anggarannya sendiri.

3.6 Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah di NTT maupun pemangku kepentingan fiskal pada tingkat nasional. Pertama, diperlukan moratorium selektif atau pengendalian ketat terhadap rekrutmen pegawai baru, khususnya PPPK, pada daerah dengan proporsi belanja pegawai yang telah melampaui ambang wajar, disertai dengan analisis kebutuhan riil berbasis beban kerja layanan publik, bukan sekadar pemenuhan formasi. Kedua, penguatan kapasitas eksekusi anggaran modal menjadi prioritas mendesak, mengingat kegagalan realisasi pagu modal (37,55%) menunjukkan persoalan bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada tata kelola pengadaan, kesiapan dokumen perencanaan, dan manajemen kontrak dengan pihak ketiga.

Ketiga, mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat perlu didesain ulang agar memberikan insentif yang lebih eksplisit bagi peningkatan proporsi belanja modal, misalnya melalui skema *earmark* yang mengikat sebagian dana transfer pada belanja infrastruktur dengan sanksi atau insentif berbasis kinerja realisasi. Keempat, daerah dengan IKF rendah namun mampu menjaga proporsi belanja modal relatif lebih baik, seperti Kab. Sumba Barat Daya dan Kab.

Manggarai Timur, dapat dijadikan model pembelajaran kebijakan (*policy learning*) bagi daerah lain dengan karakteristik fiskal serupa. Kelima, transformasi menuju penganggaran berbasis *outcome* sebagaimana dianjurkan kerangka *New Public Financial Management* (NPFM) [36] perlu diperkuat melalui penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi yang secara eksplisit mengaitkan alokasi anggaran dengan indikator capaian pembangunan manusia, bukan sekadar penyerapan anggaran.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi eksistensi paradoks fiskal yang persisten dalam struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, ditandai oleh dominasi belanja pegawai yang hampir imun terhadap tekanan efisiensi fiskal, berbanding terbalik dengan belanja modal yang mengalami kontraksi tajam hingga jauh di bawah ambang produktif yang disyaratkan dalam UU HKPD 2022. Analisis atas 22 kabupaten/kota mengungkap variasi yang bermakna: paradoks fiskal tidak eksklusif dialami daerah dengan kemandirian fiskal rendah, tetapi juga dapat terjadi pada daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif lebih baik, ketika ruang fiskalnya dibatasi oleh *fiscal rigidity*. Evaluasi *value for money* pada tiga dimensi mengonfirmasi bahwa paradoks ini menghasilkan misalokasi struktural, kegagalan eksekusi anggaran, dan *disconnection* antara belanja dan capaian pembangunan manusia.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi kerangka *path dependency* dan *incrementalism* dalam menjelaskan persistensi struktur belanja daerah yang secara ekonomi tidak lagi optimal, sekaligus memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan bukti empiris berbasis data aktual dari daerah tertinggal di Indonesia Timur. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan data satu tahun anggaran aktual (2025) untuk analisis tingkat kabupaten/kota, sehingga penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan analisis panel multi-tahun pada tingkat kabupaten/kota guna menguji secara lebih ketat kausalitas antara struktur belanja dan indikator pembangunan manusia, serta mengeksplorasi peran variabel kelembagaan lokal seperti kualitas kepemimpinan fiskal dan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

REFERENCES

- [1] B. D. Lewis, "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 59, no. 1, pp. 1–28, 2023, doi: 10.1080/00074918.2023.2180838.
- [2] A. Azwar, "Analisis Dinamis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja Kesehatan Dan Kesejahteraan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan," *Info Artha*, vol. 6, no. 1, pp. 49–62, 2022, doi: 10.31092/jia.v6i1.1621.
- [3] N. F. Putri, R. Indriani, and D. Rahmadini, "Effectiveness of Local Revenue and Balance Funds on Capital Expenditure in Indonesian Local Government," *J. Akunt. DAN BISNIS J. Progr. Stud. Akunt.*, vol. 10, no. 1 SE-Articles, pp. 1–8, May 2024, doi: 10.31289/jab.v10i1.10791.
- [4] D. Damayanti, A. Made, and A. Retnasari, "The Effect of Local Own Income and Transfer Funds on Fiscal Independence with Capital Expenditures as an Intervening Variable," in *Proceedings of the 7th Regional Accounting Conference (KRA 2020)*, Atlantis Press, 2021, pp. 111–117. doi: 10.2991/aebmr.k.210416.015.
- [5] Badan Pusat Statistik, "Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi." Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkvGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWwTlSZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi/>
- [6] A. Frinaldi, T. Pratama, A. Asnil, and N. E. Putri, "ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024: DOMINASI BELANJA OPERASI DAN DAMPAKNYA PADA PEMBANGUNAN DAERAH," *Soc. J. Inov. Pendidik. IPS*, vol. 5, no. 4 SE-Articles, pp. 1653–1663, Dec. 2025, doi: 10.51878/social.v5i4.8557.
- [7] H. Anangga Diffia, H. Harmono, N. Duma Sitinjak, and D. Zuhroh, "Fiscal Decentralization and The Keynesian Multiplier: Evidence From Indonesian Regional Governments," *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 11, no. 2 SE-Articles, pp. 132–150, Sep. 2025, doi: 10.26905/ap.v11i2.15888.
- [8] H. E. Kii, Harmono, and M. Sumtaky, "The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, and other Legitimate Regional Revenues on Regional Independence Through Direct Expenditure (Empire Study: District/City Governments in East Nusa Tenggara Province)," *Eur. J. Bus. Manag. Res.*, vol. 7, no. 6, pp. 204–213, 2022, doi: 10.24018/ejbmr.2022.7.6.1719.
- [9] E. Sofilda, M. Zilal Hamzah, and S. Kusairi, "Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia," *Cogent Econ. Financ.*, vol. 11, no. 1, p. 2220520, Dec. 2023, doi: 10.1080/23322039.2023.2220520.

- [10] R. A. Syafri, E. Sofilda, and A. Suparyati, "Determinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 9, no. 4 SE-Articles, pp. 277–290, Dec. 2024, doi: 10.33105/itrev.v9i4.858.
- [11] M. Nirwan, "Tata Kelola Anggaran dan Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *J. Plano Buana*, vol. 5, no. 2, pp. 98–108, 2025, doi: 10.36456/ctdq8v97.
- [12] A. Y. Noeng, L. Ardini, and Kurnia, "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI: (Studi Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020)," *Own. Ris. dan J. Akunt.*, vol. 7, no. 4 SE-, pp. 2905–2916, Oct. 2023, doi: 10.33395/owner.v7i4.1689.
- [13] J. Tuarita, Abdulatip Banda, and Saiful, "Evaluasi Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Standar Kesehatan Fiskal Daerah: Studi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025," *J. Paris Langkis*, vol. 6, no. 1 SE-, pp. 168–178, Dec. 2025, doi: 10.37304/parislangkis.v6i1.24081.
- [14] Ulfiah Syukri, S. Sofiaturohmah, and A. Kasman, "Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025," *J. Gov. Innov.*, vol. 7, no. 1 SE-Articles, pp. 347–359, Mar. 2025, doi: 10.36636/jogiv.v7i1.6832.
- [15] L. R. Ihwandi and Khoirunurrofik, "Regional Financial Performance and Inclusive Economic Development," *J. Bina Praja*, vol. 15, no. 2, pp. 417–429, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1806>
- [16] R. K. Sakti, N. S. Bintoro, A. M. Setyanti, and R. A. Agustin, "Exploring the Nexus between Regional Fiscal Capacity and the Convergence of Inclusive Economic Development," *J. Contemp. Gov. Public Policy*, vol. 5, no. 1, pp. 55–70, 2024, doi: 10.46507/jcgpp.v5i1.261.
- [17] D. Hummel and B. Kusumasari, "Local Government Financial Performance and Decentralization in Indonesia," *State Local Gov. Rev.*, no. 2, 2025, doi: 10.1177/0160323X251364379.
- [18] F. Fathiyah, A. Sukmana, and H. Majid, "Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi," *J-MAS (Jurnal Manaj. dan Sains)*, vol. 6, no. 1, p. 117, 2021, doi: 10.33087/jmas.v6i1.236.
- [19] W. Y. Darmastuti, E. Susilowati, and O. Tannar, "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur," *J. Proaksi*, vol. 9, no. 1, pp. 1–13, 2022, doi: 10.32534/jpk.v9i1.1913.
- [20] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2022.
- [21] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. in Applied Social Research Methods. SAGE Publications, 2018.
- [22] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications, 2020.
- [23] Kanwil DJPb Provinsi NTT, "Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025," Kupang, 2025. [Online]. Available: https://s.id/KFR_NTT
- [24] P. Pierson, "Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics," *Am. Polit. Sci. Rev.*, vol. 94, no. 2, pp. 251–267, 2000, doi: DOI: 10.2307/2586011.
- [25] S. Herrera, M. Mastruzzi, and H. Isaka, "PFR Fundamentals : Budget Rigidity," Washington, D.C., 2024. Accessed: Jul. 06, 2026. [Online]. Available: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099053124144130837>
- [26] Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur." Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur>
- [27] L. A. Here and A. Solihin, "The Effect of Fiscal Policy and Macroeconomic Factors on Poverty in Districts/Cities of East Nusa Tenggara Province," *J. Math. Instr. Soc. Res. Opin.*, vol. 5, no. 1 SE-Articles, pp. 893–902, Mar. 2026, doi: 10.58421/misro.v5i1.1297.
- [28] Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, "Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2025," Kupang, 2025. [Online]. Available: <https://ntt.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/0486bf7b20576e8f1faa5384/provinsi-nusa-tenggara-timur-dalam-angka-2025.html>
- [29] M. B. A. Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- [30] G. Grossi and D. Argento, "The fate of accounting for public governance development," *Accounting, Audit. Account. J.*, vol. 35, no. 9, pp. 272–303, 2022, doi: 10.1108/AAAJ-11-2020-5001.
- [31] N. A. Az Zakiyyah, "Infrastructure and Poverty: State Budget Effect Analysis with Panel Model," *JAMPE (Journal Asset Manag. Public Econ.*, vol. 2, no. 2 SE-Articles, pp. 82–94, Jul. 2023, doi: 10.12928/jampe.v2i2.7943.

-
- [32] Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrULJZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi/>
- [33] Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, “Potret Stunting di Indonesia.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-stunting-di-indonesia/>
- [34] B. D. Jones and F. R. Baumgartner, “A Model of Choice for Public Policy,” *J. Public Adm. Res. Theory*, vol. 15, no. 3, pp. 325–351, Jul. 2005, doi: 10.1093/jopart/mui018.
- [35] A. B. Wildavsky and N. Caiden, *The New Politics of the Budgetary Process (5th ed.)*. in Longman Classics Series. Pearson/Longman, 2004.
- [36] Z. Hoque, “Outcome budgets in government entities: rhetoric or a reality!,” *Account. Manag. Rev. | Rev. Contab. e Gestão*, vol. 26, no. 1, pp. 155–173, 2022, doi: 10.55486/amrrcg.v26i.7a.